

PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

*Utilization of Information Technology and Government Internal Control
Systems Against the Quality Of Local Government Financial Reports*

HASDIANA¹⁾, ISMAIL HASANG²⁾

Email: hasdianailham@gmail.com¹⁾, ismail_hasang@yahoo.com²⁾

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare
Jl. Jend. Ahmad Yani, Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, 91131

ABSTRACT

The quality of government financial reports is influenced by the utilization of information technology. Constraints to the application of information technology are related to hardware conditions, software used, updating data, conditions of existing human resources, and limited funds. Another thing that affects the quality of financial statements is the government's internal control system itself. This study aims to determine the factors that influence the quality of local government financial reports. Where the factors that influence are the use of information technology and the government's internal control system. Respondents in this study were the head of the department and the finance department of the regional government of the Parepare City. Data analysis using the SPSS version 21.0 program. The statistical method used to test the hypothesis is linear double regression analysis.

Keywords : Quality of Financial Reports, Utilization of Information technology, Government Internal Control Systems

PENDAHULUAN

Organisasi sektor publik di Indonesia dalam praktiknya kini diwarnai dengan munculnya fenomena menguatnya tuntutan akuntabilitas atas organisasi-organisasi publik tersebut, baik di pusat maupun daerah. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Masih banyaknya fenomena laporan keuangan pemerintah yang belum menyajikan data-data yang sesuai dengan peraturan dan masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah membuat tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance government*) meningkat.

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Kualitas laporan keuangan pemerintah dipengaruhi oleh pemanfaatan teknologi informasi. Teknologi dipandang sebagai alat yang digunakan oleh individu untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Walaupun secara umum telah banyak diketahui manfaat

yang ditawarkan oleh suatu teknologi informasi antara lain kecepatan pemrosesan transaksi dan penyiapan laporan, keakuratan perhitungan, penyimpanan data dalam jumlah besar, pemrosesan yang lebih rendah, kemampuan *multiprocessing* (Wahana Komputer, 2003), namun pengimplementasian teknologi informasi tidaklah murah. Terlebih jika teknologi informasi yang ada tidak atau belum mampu dimanfaatkan secara maksimal maka implementasi teknologi menjadi sia-sia dan semakin mahal. Kendala penerapan teknologi informasi antara lain berkaitan dengan kondisi perangkat keras, perangkat lunak yang digunakan, pemutakhiran data, kondisi sumber daya manusia yang ada, dan keterbatasan dana. Kendala ini yang mungkin menjadi faktor pemanfaatan teknologi informasi di instansi pemerintah belum optimal.

Di dalam Undang-Undang yang mengatur Keuangan Negara, terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan; dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari presiden sebagian diserahkan kepada gubernur/ bupati/ walikota selaku kepala pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Ketentuan tersebut berimplikasi pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa kepala daerah (gubernur/ bupati/ walikota) adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan daerah.

Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan instansi pemerintah akan mendorong terciptanya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang baik sesuai dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 - 2014. Hal ini dikarenakan SPIP mempunyai 4 tujuan yang ingin dicapai yaitu (1) Kegiatan yang efektif dan efisien, (2) Laporan keuangan yang dapat diandalkan, (3) Pengamanan aset negara, dan (4) Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 59 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, BPKP dinyatakan sebagai pembina penyelenggaraan SPIP yang mempunyai kewajiban menyusun pedoman teknis penyelenggaraan SPIP, mensosialisasikan SPIP, melakukan pendidikan dan pelatihan SPIP, melakukan pembimbingan dan konsultasi SPIP, serta melakukan peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah.

Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan telah diteliti pada ilmu-ilmu sosial khususnya di bidang psikologis dan sosiologi yang lebih menekankan pada pentingnya proses sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan seorang individu. Menurut Tyler dalam Septiani, (2005) dalam Faristina, (2011), terdapat dua perspektif dasar dalam literatur sosiologi mengenai kepatuhan pada hukum, yang disebut instrumental dan normatif. Perspektif instrumental mengasumsikan individu secara utuh didorong oleh kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan-perubahan dalam *tangible*, insentif, dan penalti yang berhubungan dengan perilaku. Perspektif normatif berhubungandengan apa yang orang anggap sebagai moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi mereka.

Pemerintah Daerah

Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pemerintah daerah adalah penyelenggara pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-

sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu kepada undang-undang yang mengatur perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, dimana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah dan daerah. Semuasumber

Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah catatan informasi suatu entitas pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja entitas tersebut. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan dapat dikatakan sebagai data, juga dapat dikatakan sebagai informasi. Data dapat berubah menjadi informasi jika diubah kedalam konteks yang memberikan makna (Lillrank, 2003).

Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI)

Teknologi informasi dapat diartikan sebagai suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Teknologi ini menggunakan seperangkat komputer untuk mengolah data, sistem jaringan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lainnya sesuai dengan kebutuhan, dan teknologi telekomunikasi digunakan agar data dapat disebar dan diakses secara global (Rahmawati, 2010).

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan instansi pemerintah akan mendorong terciptanya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang baik sesuai dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 - 2014. Hal ini dikarenakan SPIP mempunyai 4 tujuan yang ingin dicapai yaitu (1) Kegiatan yang efektif dan efisien, (2) Laporan keuangan yang dapat diandalkan, (3) Pengamanan aset negara, dan (4) Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pengertian Sistem Pengendalian Intern menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP adalah Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Agar manfaat dan tujuan penyajian laporan keuangan pemerintah dapat dipenuhi maka informasi yang disajikan harus merupakan informasi yang bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Mengatakan bahwa informasi harus bermanfaat bagi para pemakai sama saja dengan mengatakan bahwa informasi harus mempunyai kualitas (Suwardjono, 2005 dalam Desi dan Ertambang, 2008). Keterandalan adalah kemampuan informasi untuk memberi keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid. Informasi dalam laporan keuangan harus andal, yakni bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi (Celviana dan Rahmawati, 2010).

METODE PENELITIAN

Metode Pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mendatangi secara langsung Badan Keuangan Daerah (BKD), Inspektorat dan DPRD Kota Parepare dan memberikan kuesioner yang berisi pertanyaan terstruktur yang ditujukan kepada responden.

A. Uji Validitas

Priyatno (2010:90) mengemukakan bahwa “uji validitas sering digunakan untuk mengukur ketepatan suatu item dalam kuesioner atau skala, apakah item-item pada kuesioner tersebut sudah tepat dalam mengukur apa yang ingin di ukur”. Pengujian validitas data dalam penelitian ini menggunakan metode korelasi Bivariat Pearson (Korelasi Pearson Product Moment). Priyatno (2010:90) mengemukakan bahwa: “Analisis ini dilakukan dengan cara mengkorelasikan masing- masing skor item dengan skor total. Skor total adalah penjumlahan dari keseluruhan item. Item-item pertanyaan yang berkorelasi signifikan dengan skor total menunjukkan item-item tersebut mampu memberikan dukungan dalam mengungkap apa yang ingin diungkap.”

Pengujian menggunakan uji dua sisi dengan taraf signifikansi 0,05. Kriteria pengujian kriteria pengujiannya adalah jika r hitung $\geq r$ tabel maka instrumen atau item-item pernyataan berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan valid). Jumlah data (n) = 25, maka di dapat r tabel sebesar 0,396.

B. Uji Reliabilitas

Menurut Priyatno (2010:97) “uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang”. Uji reliabilitas hanya dilakukan untuk item pernyataan yang valid. Uji reliabilitas data dalam penelitian ini menggunakan metode Cronbach’s Alpha. Menurut Sekaran (1992) dalam Priyatno (2010:98), “reliabilitas kurang dari 0,5 adalah kurang baik, sedangkan 0,7 dapat di terima dan di atas 0,8 adalah baik”.

C. Analisis Regresi Berganda

Pengujian terhadap hipotesis penelitian dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Regresi linier berganda digunakan untuk menentukan pola hubungan antara lebih dari satu variabel independen dengan satu variabel dependen (Ghozali, 2009). Persamaan dari regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan :

- Y = kualitas laporan
- a = konstanta (intercept)
- X1 = pemanfaatan teknologi informasi
- X2 = sistem pengendalian intern
- b1, b2 = koefisien regresi
- e = kesalahan pengganggu (standard error)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data penelitian dikumpulkan dengan mengirimkan sebanyak 30 kuesioner yang diantar langsung ke 3 Instansi Pemerintah Daerah Kota Parepare yaitu Kantor Inspektorat Kota Parepare, Kantor Badan Keuangan Daerah serta Kantor DPRD Kota Parepare dengan responden sebanyak 30 responden. Pengiriman kuesioner dilakukan secara langsung dengan batas pengambilan 3 minggu setelah pembagian kuesioner. Kuesioner yang kembali hanya 25 Lembar kuesioner.

A. Profil responden

Profil responden tersebut meliputi tingkat pendidikan, lama bekerja, jabatan, dan pangkat golongan.

1. Latar Belakang Pendidikan

Data responden berdasarkan latar belakang pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1
Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persen (%)
1	D3	2	8,0
2	S1	21	84,0
3	S2	2	8,0
	Total	25	100,0

2. Lama Bekerja di Dinas PPKAD, Inspektorat dan DPRD

Data responden berdasarkan lama bekerja Dinas PPKAD, Inspektorat dan DPRD Kota Parepare dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 2
Lama bekerja Responden

No	Lama bekerja	Jumlah	Persen (%)
1	5- 10Tahun	4	16 %
2	11 - 15 Tahun	2	8 %
3	16 - 20 Tahun	8	32 %
4	21 - 25 Tahun	2	8 %
5	26 - 30 Tahun	9	36 %
	Total	25	100 %

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa responden sebagian besar bekerja lebih dari 26 tahun. Hal ini diketahui dari persentasenya sebesar 36%. Jabatan pegawai di Dinas PPKAD, Inspektorat dan DPRD. Data responden berdasarkan jabatan responden pada Dinas PPKAD, Inspektorat dan DPRD dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 3
Jabatan Responden

No	Jabatan Respdnen	Jumlah	Persen
1	Auditor	3	12 %
2	Kabid Akuntansi	1	4 %
3	Kasi Akuntansi	1	4 %
4	Kasi Verivikasi	1	4 %
5	Kasubag Bagian Keuangan	1	4 %
6	Kasubag Perbendaharaan	1	4 %
7	Kasubag Verivikasi	1	4 %
8	Kepala Bagian Keuangan	1	4 %
9	Kepala Seksi Anggaran	1	4 %
10	Sekretaris	1	4 %
11	Staf Bagian Keuangan	6	24 %
12	Staf Bidang Akuntansi	2	8 %
13	Staf Perbendaharaan	3	12 %
14	Staf Verivikasi	2	8 %
	Total	25	100

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa responden yang menjawab sebagian besar pertanyaan dari kuisioner yang dibagikan adalah staf bagian keuangan. Hal ini diketahui dari persentasenya sebesar 24%

3. Pangkat Golongan pegawai di Dinas PPKAD, Inspektorat dan DPRD

Data responden berdasarkan pangkat golongan responden pada Dinas PPKAD, Inspektorat dan DPRD dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 4
Pangkat Golongan Responden

No	Pangkat Golongan	Jumlah	Persen
1	II/a	1	4 %
2	II/d	1	4 %
3	III/a	2	8 %
4	III/b	8	32 %
5	III/c	1	4 %
6	III/d	9	36 %
7	IV/a	1	4 %
8	IV/b	2	8 %
Total		25	100 %

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa responden yang bekerja di Dinas PPKAD, Inspektorat dan DPRD sebagian besar memiliki pangkat golongan III/d. Hal ini diketahui dari persentasenya sebesar 36%.

a. Analisis kualitas Data

Statistik deskriptif mempunyai tujuan untuk memberikan gambaran mengenai variabel-variabel penelitian. Hasil analisis deskriptif dengan menggunakan bantuan program SPSS adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Hasil Analisis Deskriptif Statistik

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pemanfaatan Teknologi Informasi	25	14,00	25,00	20,480	2,3473
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	25	17,00	24,00	20,640	1,4399
Kualitas Laporan Keuangan	25	18,00	25,00	21,640	1,9975
Valid N (listwise)	25				

Berdasarkan tabel 5.5 maka dapat diketahui bahwa jumlah data penelitian (N) adalah sebesar 25 data. Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi mempunyai nilai minimum sebesar 14 dan nilai maksimum sebesar 25. Nilai rata-rata Pemanfaatan Teknologi Informasi adalah sebesar 20,480 dengan nilai standar deviasi sebesar 2,347. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dibandingkan nilai rata-ratanya mengandung arti

bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi pada Dinas PPKAD, Inspektorat dan DPRD kota Parepare jauh berbeda antar Instansi daerah.

Variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mempunyai nilai minimum 18 dan nilai maksimum 25. Rata-rata kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah sebesar 21,640. Nilai standar deviasi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah sebesar 1,997. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dibandingkan nilai rata-ratanya mengandung arti bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Dinas PPKAD, DPRD dan Inspektorat kota Parepare tidak jauh berbeda.

b. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen

1) Uji Validitas

Uji validitas dengan program SPSS diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 6
Hasil Uji Validitas

Item Pertanyaan	r hitung	r table	Keterangan
TI1	649	0,432	Valid
TI2	691	0,432	Valid
TI3	808	0,432	Valid
TI4	763	0,432	Valid
TI5	784	0,432	Valid
SPIP 1	532	0,432	Valid
SPIP 2	598	0,432	Valid
SPIP 3	451	0,432	Valid
SPIP 4	613	0,432	Valid
SPIP 5	419	0,432	Tidak Valid
LK1	469	0,432	Valid
LK2	864	0,432	Valid
LK3	817	0,432	Valid
LK4	678	0,432	Valid
LK5	708	0,432	Valid

Nilai r kritis (uji 2 sisi) pada signifikansi 5% dengan $n = 25$ ($df = n - 3 = 22$), di dapat sebesar 0.432, berdasarkan Tabel 1.7 diketahui bahwa sebagian kuesioner memiliki r hitung lebih dari r table ($r \text{ hitung} > 0,432$), yaitu item dari variabel pemanfaatan teknologi informasi, dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dinyatakan valid sedangkan sebagian item dari variabel sistem pengendalian intern pemerintah dinyatakan tidak valid.

2) Uji Reliabilitas

Tabel 7
Hasil Uji Reliabilitas

Kuisisioner	AlphaCronbach	Nilai Kritis	Keterangan
TI	792	0,5	Reliabel
SPIP	271	0,5	Tidak Reliabel
LK	753	0,5	Reliabel

Dari hasil analisis di dapat nilai Alpha untuk pemanfaatan teknologi informasi sebesar 0,792 dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 0,753, sedangkan nilai r kritis (uji 2 sisi) pada signifikansi 5% dengan $n = 25$ ($df=n-3= 22$), di dapat sebesar 0.432. maka dapat disimpulkan bahwa sebagian butir-butir instrument penelitian tersebut reliabel. Sedangkan uji reabilitas dari Sistem pengendalian intern pemerintah didapat nilai alpha sebesar 0,271 sedangkan nilai r kritis (uji 2 sisi) pada signifikansi 5 % dengan $n = 25$ ($df=n-3=22$) didapat sebesar 0,432, maka dapat disimpulkan bahwa butir-butir instrument tidak reliabel.

3) Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi pertama dalam penelitian ini dimaksudkan untuk melihat bagaimana pengaruh pemanfaatan TI, sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan menggunakan bantuan program SPSS 21 didapatkan hasil sebagai berikut :

Tabel 8
Hasil Analisis Regresi Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	13,575	5,834		2,327	,030
Pemanfaatan Teknologi Informasi	,298	,181	,351	1,650	,113
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	,095	,295	,068	,321	,751

Berdasarkan Tabel 5.8 maka persamaan regresi yang didapatkan adalah sebagai berikut :

Pemanfaatan teknologi informasi mempunyai nilai signifikan sebesar 0,113 sedangkan taraf signifikan yang digunakan adalah 0,05 yang artinya semakin kecil hasil signifikan. Sistem pengendalian intern pemerintah mempunyai nilai signifikan sebesar 0,751 sedangkan taraf signifikan yang digunakan 0,05 yang artinya semakin kecil hasil signifikan maka semakin kuat pengaruh yang ditimbulkan antar variabel. Dari hasil SPSS 21 yang digunakan didapatkan nilai signifikan 0,751 > 0,05 yang artinya pengaruh yang ditimbulkan oleh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah memiliki pengaruh yang lemah.

4) Uji t (Regresi Parsial)

Selanjutnya untuk menyakinkan bahwa masing-masing variabel yaitu : pemanfaatan TI, dan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan pengujian secara parsial. Dari perhitungan komputer yang disajikan dalam lampiran dan diperoleh nilai thitung sebagai berikut ini.

Tabel 9
Hasil Uji t

Variabel	t hitung	t table	Sig.	a 5%	Ket
PI	1,650	2,073	0,113	0,05	Cukup
SIPI	0,321	2,073	0,751	0,05	Lemah

5) Uji F

Uji F seringkali juga dinamakan dengan *analysis of variance*. Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah variabel-variabel penjelas yang digunakan dalam model, secara bersama-sama mempunyai pengaruh atau tidak terhadap variabel yang ingin dijelaskan dengan menggunakan uji F test. Pengujian ini dilakukan untuk menguji pengaruh X1, X2, terhadap Y secara bersama-sama

Tabel 10
Hasil Uji F

ANOVA ^a						
	Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	13,928	2	6,964	1,872	,177 ^b
	Residual	81,832	22	3,720		
	Total	95,760	24			

Berdasarkan tabel 5.10 tampak bahwa nilai F hitung sebesar 1,872 lebih kecil dari F tabel sebesar 3,05 dengan angka signifikansi = 0,177 > $\alpha = 0,05$. Hal ini berarti bahwa model penelitian adalah cukup fit atau dengan kata lain terdapat pengaruh yang cukup signifikan antara pemanfaatan TI, dan sistem pengendalian intern pemerintah. Koefisien Determinasi

Uji determinasi adalah uji yang digunakan untuk mengetahui besaran dalam persen pengaruh variabel independen secara keseluruhan terhadap variabel dependen. Dari uji determinasi dihasilkan nilai R² sebagaimana dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 11
Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,381 ^a	,145	,068	1,92864

Berdasarkan hasil uji determinasi diketahui bahwa nilai *adjusted R square* sebesar 0,068 yang mengandung arti bahwa 6,8% variasi besarnya kualitas laporan keuangan tidak sepenuhnya bisa dijelaskan oleh variasi, pemanfaatan TI, dan sistem pengendalian intern pemerintah. Sedangkan sisanya 93,2% lainnya dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

c. Pengujian Hipotesis

1) Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas laporan Keuangan

Berdasarkan tabel regresi berganda diperoleh nilai koefisien regresi pemanfaatan teknologi informasi 0,113 hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi mempunyai pengaruh yang cukup terhadap kualitas laporan keuangan. Nilai signifikansi pemanfaatan teknologi informasi adalah 0,113 > 0,05. Ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2) Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan tabel regresi berganda, diperoleh nilai koefisien regresi pengendalian intern akuntansi 0,751 hal ini menunjukkan bahwa sistem

pengendalian intern pemerintah memiliki pengaruh yang lemah terhadap kualitas laporan keuangan. Nilai signifikansi sistem pengendalian intern pemerintah adalah $0,751 > 0,05$. Ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh lemah terhadap kualitas laporan keuangan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis tentang pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pemanfaatan teknologi informasi yang meliputi teknologi komputer, internet dan teknologi komunikasi dalam pengelolaan keuangan daerah sudah cukup dimanfaatkan secara baik sehingga peningkatan pemrosesan transaksi dan data lainnya, keakuratan dalam perhitungan, serta penyiapan laporan dan *output* lainnya telah dilakukan secara tepatwaktu.
2. Sistem pengendalian intern pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah yang meliputi proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan belum bisa diterapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Faristina Rosalin. 2011. *Faktor- faktor yang Mempengaruhi Keandalan dan Timeliness Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum, Studi pada BLU di Kota Semarang*. Skripsi Universitas Diponegoro : Semarang.
- Imam Ghozali. 2001. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi 3. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Imam Ghozali, I. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit-UNDIP.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah